



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH TAHUN 2025-2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPTD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Air Bersih di wilayah kerjanya dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin UPTD PAB.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rokan Hulu untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPTD PAB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik Analisa bisnis.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renstra BLUD UPTD PAB menjadi pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan RBA.

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD UPTD PAB memuat:

- a. rencana pembangunan layanan;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. gambaran umum UPTD PAB;
 - d. visi dan misi;
 - e. analisa swot;
 - f. rencana pengembangan layanan; dan
 - g. proyeksi laporan keuangan.
- (2) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
 - c. rencana program dan kegiatan.
- (3) Renstra BLUD UPTD PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan Renstra BLUD UPTD PAB
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan Renstra BLUD UPTD PAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 6

Pemimpin BLUD UPTD PAB melaksanakan Renstra BLUD UPTD PAB.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD melaporkan pemenuhan Renstra BLUD UPTD PAB kepada Bupati dan Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR
BERSIH TAHUN 2025-2029**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), mengamanatkan bahwa tugas pengembangan pembangunan dan pengelolaan jaringan Air Bersih merupakan tugas pemerintah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan pengelolaan pelayanan Air Bersih sistem perpipaan di Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Bersih dibawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seiring dengan tugas tersebut guna menuju terpenuhinya mutu dan keluaran hasil pengembangan dan pengelolaan infrastruktur di bidang Air Bersih, maka diperlukan suatu rencana strategis dalam hal Sistem Penyediaan Air Bersih.

Air Bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk itu, sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi dari Air Bersih perlu direncanakan suatu Sistem Penyediaan Air Bersih sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengolahan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian sumber daya air.

Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah harus melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan Air Bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Rencana Strategis selanjutnya menjadi suatu syarat bagi UPTD Pengelolaan Air Bersih yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dalam mewujudkan tugas wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Mengingat pesatnya perkembangan Kabupaten Rokan Hulu baik bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan jasa, terutama kawasan perumahan dan permukiman, Kabupaten Rokan Hulu terus meningkatkan sarana dan prasarana Air Bersih dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Disamping itu Rencana Strategis ini juga di maksudkan untuk mempercepat pencapaian target pelayanan SDG (Sustainable Development Goals) dengan target pelayanan Air Bersih tercapai 100% untuk perkotaan dan pedesaan. Serta untuk mendukung nawacita Presiden Republik Indonesia di bidang Air Minum dan sanitasi berupa pencapaian RAD 100-0- 100, dimana pemerataan pelayanan Air Minum bagi seluruh masyarakat Indonesia mencapai 100% dengan kumuh/ kawasan kumuh 0% dan sanitasi lingkungan 100%.

1.2 Maksud dan Tujuan RENSTRA

Renstra BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPTD PAB dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 79 Tahun 2018, adalah:

- a. Memberikan arah yang jelas atas pengembangan sistem pelayanan Air Bersih di masa depan di Kabupaten Rokan Hulu, serta terjaminnya hak masyarakat dalam menerima pelayanan Air Bersih dari Pemerintah Daerah melalui BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebagai pedoman untuk pencapaian sasaran yang disesuaikan dengan visi, misi dan sasaran BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu. Sasaran yang akan dicapai sebaiknya direncanakan terlebih dahulu secara strategis dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Diharapkan, dengan adanya Rencana Strategis (Renstra), manajemen BLUD UPTD PAB memiliki acuan dan target-target dalam pengelolaan aset yang dikelolanya dalam rangka optimalisasi pengembangan pelayanan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam rangka menyediakan pelayanan Air Bersih, sehingga Rencana Strategis (Renstra) dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) BLUD UPTD PAB adalah sebagai acuan untuk mencapai sasaran pembangunan pelayanan Air Bersih secara efisien dan efektif. Sejalan dengan tujuan didirikannya BLUD UPTD PAB, akan fokus pada kegiatan lembaga ini adalah memberikan layanan air Bersih kepada masyarakat.

1.3 Metodologi Penyusunan RENSTRA

Langkah-langkah kerja penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengikuti sistematika yang dimulai dari strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dengan memperhatikan visi, misi dan sasaran BLUD UPTD PAB serta pengaruh kondisi internal dan eksternal (Analisis SWOT), selanjutnya menentukan langkah atau program dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah. Dilanjutkan dengan, penyusunan prognosa keuangan yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis BLUD UPTD PAB secara menyeluruh yang dinilai dari beberapa indikator keuangan.

Metodologi penyusunan proyeksi keuangan dilakukan dengan menyandarkan diri pada laporan keuangan BLUD UPTD PAB yang akan digunakan sebagai data dasar dalam menyusun proyeksi-proyeksi keuangan secara keseluruhan.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan berdasarkan pada hasil kajian teknis dan atau berdasarkan pengalaman (realitas) di lapangan kurun waktu 2 tahun terakhir.

Adapun proyeksi keuangan yang akan disusun adalah Proyeksi Neraca, Proyeksi Laporan Operasional dan Proyeksi Arus Kas, ketiga proyeksi keuangan sudah cukup untuk menganalisa kinerja keuangan BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu kurun waktu 5 tahun kedepan.

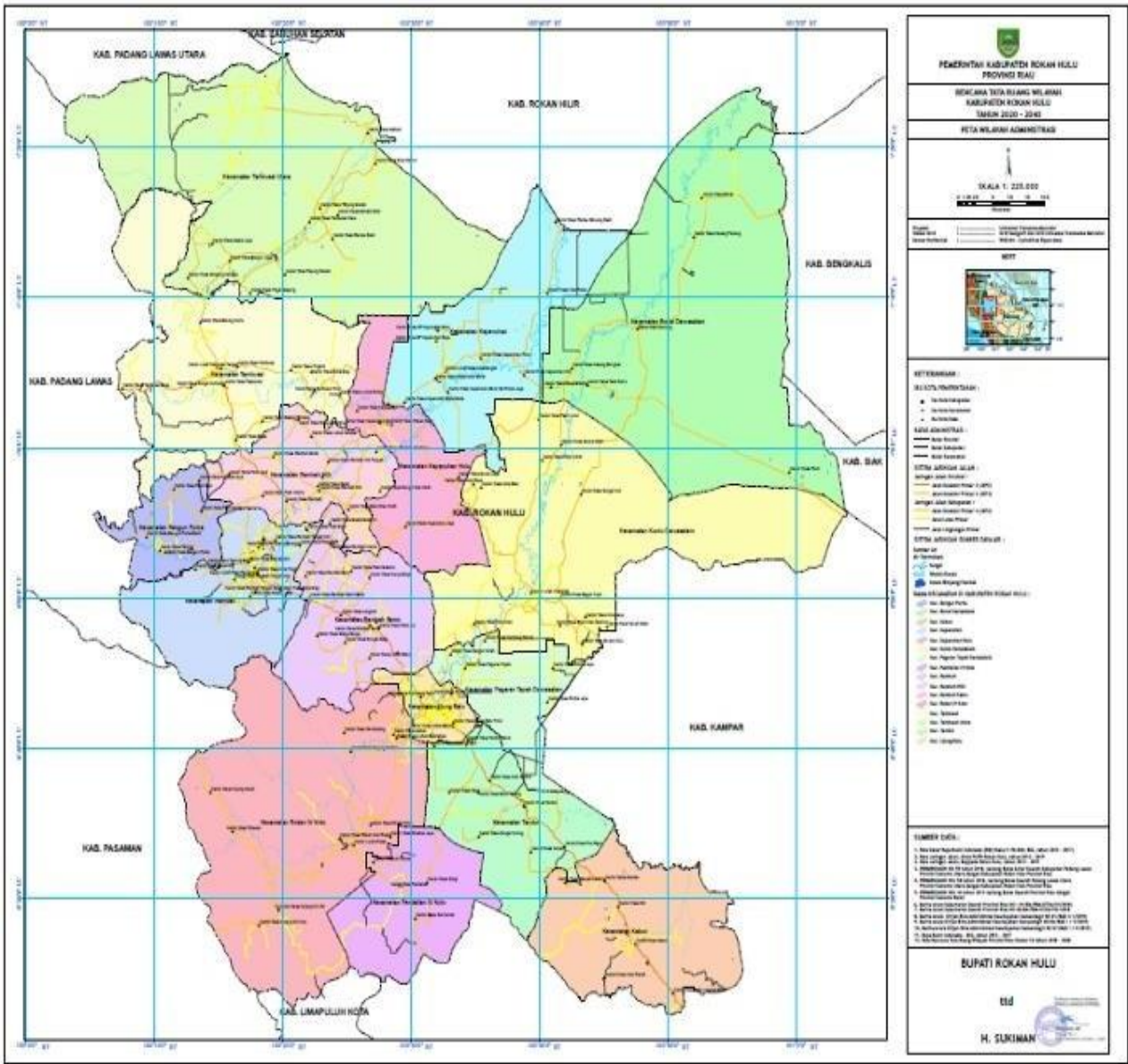
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

2.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100o - 101o 52' BT dan 0o - 1o 30' LU terdiri dari 16 Kecamatan, dan 145 Desa/Kelurahan. Kabupaten Rokan Hulu secara administratif berada di Propinsi Riau. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah 7.588,13 km2 atau 8,68% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hulu secara administrasi memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
- 2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
- 3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak
- 4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu awal terbentuknya memiliki 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kunto Darussalam. Pada tahun 2002 terjadi Pemekaran Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, Kecamatan Rambah Mekar menjadi Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Bangun Purba, lalu Kecamatan Tambusai pecah menjadi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Tahun 2003 jumlah kecamatan di Rokan hulu bertambah menjadi 12 kecamatan, hal ini terjadi karna terbentuknya Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun.

Pada tahun 2005 kembali menjadi Pemekaran Kecamatan menjadi 14 Kecamatan, hal ini karna Kecamatan Kunto Darussalam mekar menjadi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam, yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005. Pada tahun 2008 Jumlah kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Bertambah menjadi 16 Kecamatan setelah keluar peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 yang menyatakan Kecamatan Rokan IV Koto Pecah menjadi Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto, serta Kecamatan Kepenuhan Mekar menjadi Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Luas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terbesar adalah Kecamatan Tambusai Utara 1.220.92 Km² (16,09%), dan kecamatan terkecil luasnya adalah Kecamatan Ujung Batu 77,85 Km² (1,02%). Untuk lebih jelasnya ke-16 kecamatan dan luas wilayah masing-masingnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas	
		KM ²	%
1	Rokan IV Koto	932,79	12,29
2	Pendalian IV Koto	212,45	2,80
3	Tandun	315,79	4,16
4	Kabun	366,98	4,84
5	Ujung Batu	77,85	1,03
6	Rambah Samo	363,38	4,79
7	Rambah	334,12	4,40
8	Rambah Hilir	255,50	3,37
9	Bangun Purba	156,22	2,06
10	Tambusai	664,28	8,75
11	Tambusai Utara	1.220,92	16,09
12	Kepenuhan	273,17	3,60
13	Kepenuhan Hulu	465,10	6,13
14	Kunto Darussalam	584,27	7,70
15	Pagaran Tapah	151,78	2,00
16	Bonai Darussalam	1.213,53	15,99
		7.588,13	100,00
Sumber : RT RW Kab. Rokan Hulu 2020 - 2040			

2.2 Hidrogeologi

2.2.1 Air Permukaan

Sungai yang melintas di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang berpola dendritik. Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat tiga buah sungai besar yaitu Sungai Rokan Kiri, Sungai Rokan Kanan dan Sungai Sosah. Sungai Rokan Kiri dan Sungai Rokan Kanan

masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber Air Bersih dan budidaya ikan. Sungai Rokan bagian hulu mempunyai panjang + 100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dan lebar rata-rata sebesar 92 m.

Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran ini mengalir Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Bonai darussalam.

2.2.2 Air Tanah

Beberapa tempat di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kemampuan untuk menyerap air tanah dengan baik, dimana lokasi tersebut sebagai hulu dari sungai- sungai. Saat ini, kawasan tersebut sedang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan pertanian (lahan budidaya). Sebagian besar di lahan ini terjadi kegiatan intensif masyarakat sehingga terjadi pengolahan- pengolahan tanah yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Bahkan beberapa jenis tanaman yang ditanam tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan air tanah. Akibatnya adalah berkurangnya debit air yang dialirkan melalui sungai sungai.

2.3 Kependudukan

Jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 adalah 692.120 jiwa dengan kepadatan penduduk 91 jiwa per km2. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Tanbusai Utara yakni 113.613 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Ujng Batu dengan jumlah penduduk 75.931 jiwa dan Kecamatan Tambusai 74.121 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pendalian IV Koto dengan jumlah penduduk 12.842 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
1	Rokan IV Koto	25.870	-0,32%
2	Pendalian IV Koto	12.842	1,27%
3	Tandun	33.851	-0,50%
4	Kabun	30.108	-0,28%
5	Ujung Batu	75.931	0,97%
6	Rambah Samo	38.503	0,34%
7	Rambah	57.908	0,90%
8	Rambah Hilir	44.960	0,67%
9	Bangun Purba	19.451	1,02%
10	Tambusai	74.121	1,34%
11	Tambusai Utara	113.613	0,78%
12	Kepenuhan	32.217	2,59%
13	Kepenuhan Hulu	21.277	0,22%
14	Kunto Darussalam	65.453	-3,03%
15	Pagaran Tapah	18.760	-9,56%
16	Bonai Darussalam	27.255	4,78%
		692.120	1,19%
Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020			

BAB III

GAMBARAN UMUM UPTD PENGELOLA AIR BERSIH

3.1 Dasar Hukum

UPTD Pengelola Air Bersih merupakan unit kerja di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2018 pada tanggal 26 Januari 2018.

UPTD PAB dibentuk khusus untuk mengelola pelayanan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 meliputi unit yang berada di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 16 unit yaitu:

1. Unit Pasir Pengaraian;
2. Unit Tandun/ Bono Tapung;
3. Unit Tambusai;
4. Unit Ujung Batu;
5. Unit Rambah Hilir;
6. Unit Kepenuhan;
7. Unit Rambah Samo;
8. Unit Kabun;
9. Unit Kunto Darussalam;
10. Unit Tambusai Utara;
11. Unit Pendalian IV Koto;
12. Unit Rokan IV Koto;
13. Unit Bangun Purba;
14. Unit Pagaran Tapah;
15. Unit Kepenuhan Hulu; dan
16. Unit Bonai Darussalam.

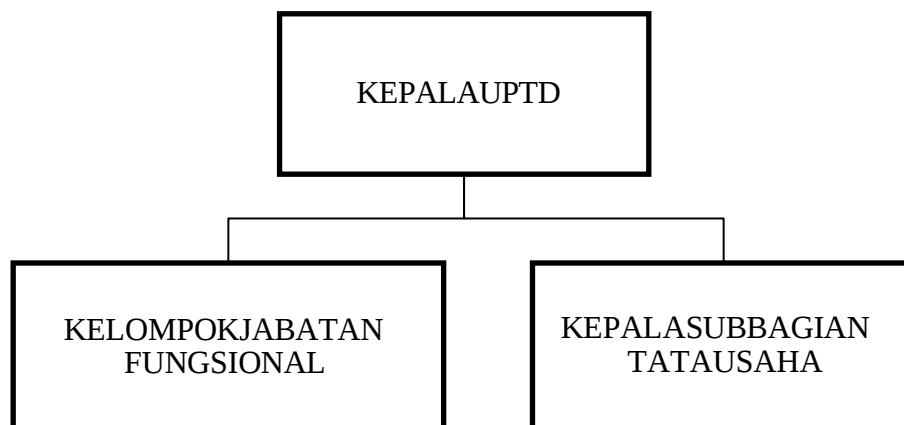
3.2 Organisasi dan Tupoksi

Struktur Organisasi UPTD Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2018 pada tanggal 26 Januari 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLA AIR BERSIH

KABUPATEN ROKAN HULU



- Kepala UPTD Pengelola Air Bersih bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Air Bersih.

Adapun Tugas Pokok UPTD Pengelola Air Bersih Kab. Rokan Hulu adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang penyediaan Air Bersih yang meliputi perumusan kebijakan teknis, ketatausahaan, dan pengembangan layanan. Hal ini sesuai dengan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu diantaranya meningkatkan pengelolaan Air Bersih.

Dalam melaksanakan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
- b. Pemberiaan ijin dan pelaksana pelayanan umum; dan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun rincian tugas Kepala UPTD PAB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1 Kepala UPTD Pengelola Air Bersih Tugas Pokok

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD agar dapat memberikan pelayanan Air Bersih terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Fungsi

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki uraian tugas:

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD;
- c. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- d. Bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang:

- a. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD;
- c. Memimpin rapat-rapat UPTD;
- d. Otorisator Keuangan UPTD; dan
- e. Membina SDM UPTD.

3.2.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD

PAB Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelola Air Bersih dibidang pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bagian umum;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/ aset UPTD Pengelola Air Bersih;
- c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
- e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Pengelola Air Bersih;
- f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih; dan
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang:

- a. Menandatangani neraca dan ikhtisar laba rugi;
- b. Menyetujui proses permintaan sambungan pelanggan baru;
- c. Menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya.

3.3 Tujuan Pembentukan UPTD PAB

Tujuan pembentukan UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu dengan pola pengelolaan keuangan secara BLUD adalah untuk peningkatan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dengan harga terjangkau karena tidak mengutamakan keuntungan, namun tetap dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektif.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PAB

UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hulu bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pelayanan umum dalam bidang Air Bersih di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan khususnya di 16 (enam belas) unit yang telah tersedia Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan perpipaan distribusi dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan organisasi tata laksana, tata kerja dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif.

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu antara lain:

- a. Pengoperasian sistem penyediaan Air Bersih melalui unit - unit yang telah dibangun dan yang akan dibangun kemudian.
- b. Meningkatkan penguatan kelembagaan UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu guna mendorong peningkatan profesionalisme SDM yang pada akhirnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan layanan Air Bersih yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- d. Percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan pelayanan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Perluasan jaringan pelayanan Air Bersih.
- f. Meningkatkan efisiensi pelayanan Air Bersih.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan pelayanan Air Bersih, maka beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan adalah:

- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) penyelenggaraan pengembangan penyediaan Air Bersih di wilayah Kab. Rokan Hulu.
- b. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
- c. mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik);
- f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana Air Bersih;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian / pemeriksaan kualitas air; dan
- i. memberikan informasi mengenai program Air Bersih kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan Air Bersih.

3.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di UPTD Pengelola Air Bersih sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 135 orang yang terdiri dari 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 116 orang pegawai Non PNS. Apabila dibandingkan dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.611 sambungan langganan, maka rasio pegawai per 1.000 pelanggan adalah 24 pegawai, dengan rincian per IKK sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Pelanggan Tahun 2023

REKAPITULASI SR				
UPTD PENGELOLA AIR BERSIH ROKAN HULU				
TAHUN 2023				
NO	UNIT	JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH PEGAWAI	RASIO PEGAWAI /1000 SL
1	KANTOR PUSAT		16	
2	PASIR PENGARAIAN	1.862	22	11,82
3	TAMBUSAI	785	12	15,29
4	RAMBAH HILIR	867	11	12,69
5	KEPENUHAN	34	6	176,47
6	BANGUN PURBA	200	8	40,00
7	RAMBAH SAMO	105	8	76,19
8	TANDUN	763	4	5,24
9	UJUNG BATU	464	10	21,55
10	ROKAN IV KOTO	90	7	77,78
11	PENDALIAN IV KOTO	58	4	68,97
12	TAMBUSAI UTARA	266	6	22,56
13	KUNTO DARUSSALAM	112	8	71,43
14	KABUN	5	3	600,00

3.6 Cakupan Pelayanan

Umum Sistem penyediaan Air Bersih melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Rokan Hulu dikelola oleh UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki 16 unit pelayanan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah pelanggan terpasang pada akhir tahun 2023 sebanyak 6.642 sambungan langganan. Namun yang masih aktif berlangganan adalah sebanyak 5.611 sambungan langganan, dan sisanya sebanyak 1.031 SL statusnya tidak aktif atau 15,57%. Banyaknya pelanggan yang tidak aktif, antara lain disebabkan oleh pendistribusian air tidak sampai, kualitas air kurang baik, dan Masyarakat memiliki sumber air lain yang biaya untuk memperolehnya lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Komposisi jumlah pelanggan secara rinci bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.2 Jumlah Pelanggan UPTD PAB Kab. Rokan Hulu

NO.	IKK	JUMLAH PELANGGAN		
		Terpasang	Aktif	Tidak Aktif
1	Rambah Hilir	889	867	22
2	Rambah samo	105	105	0
3	Bangun Purba	200	200	0
4	Kunto Darussalam	130	112	18
5	Pendalian 4 Koto	58	58	0
6	Rokan 4 Koto	98	90	8
7	Tambusai Utara	275	266	9
8	Kepenuhan	34	34	0
9	Pasir Pengaraian	2279	1862	417
10	UjungBatu	851	464	387
11	Tandun	845	763	82
12	Kabun	42	5	37
13	Dalu Dalu	836	785	51
14	Kepenuhan Hulu			
15	Pagaran Tapah			
16	Bonai Darussalam			
	JUMLAH	6.642	5.611	1.031

Sampai tahun 2023, jumlah penduduk yang terlayani oleh UPTD PAB yaitu 28.055 jiwa. Tingkat pelayanan UPTD PAB pada tahun 2023 adalah 4,05% dari jumlah penduduk total Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi ini masih belum memenuhi target pelayanan Air Bersih sesuai SDGs (Sustainable Development Goals), yaitu 45% pelayanan Air Bersih melalui jaringan perpipaan pada tahun 2030 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Masih ada kewajiban menambah cakupan pelayanan sekitar 40,952% atau 664.065 jiwa penduduk yang belum mendapatkan pelayanan Air Bersih secara layak. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Cakupan Pelayanan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah SL	Penduduk Terlayani	Cakupan Pelayanan
1	Rokan IV Koto	25.870	90	450	1,74%
2	Pendalian IV Koto	12.842	58	290	2,26%
3	Tandun	33.851	763	3.815	11,27%
4	Kabun	30.108	5	25	0,08%
5	Ujung Batu	75.931	464	2.320	3,06%
6	Rambah Samo	38.503	105	525	1,36%
7	Pasir Pengaraian	57.908	1.862	9.310	16,08%
8	Rambah Hilir	44.960	867	4.335	9,64%
9	Bangun Purba	19.451	200	1.000	5,14%
10	Tambusai / Dalu Dalu	74.121	785	3.925	5,30%
11	Tambusai Utara	113.613	266	1.330	1,17%
12	Kepenuhan	32.217	34	170	0,53%
13	Kunto Darussalam	65.453	112	560	0,86%
14	Kepenuhan Hulu	21.277	-	-	0,00%
15	Pagaran Tapah	18.760	-	-	0,00%
16	Bonai Darussalam	27.255	-	-	0,00%
	Jumlah	692.120	5.611	28.055	4,05%

3.7 Kapasitas Air

Sistem penyediaan Air Bersih yang sudah terbangun di 16 kecamatan memiliki kapasitas total sebanyak 350 liter/detik. Namun yang sudah dioperasikan baru 265 liter/detik, yang disebabkan jumlah pelanggan belum optimal dan terdapat tiga unit IKK yang belum beroperasi sama sekali karena belum memiliki pelanggan, yaitu IKK Kepenuhan Hulu, IKK Pagaran Tapah, dan IKK Bonai Darussalam.

Kapasitas air yang diproduksi untuk seluruh system adalah 83,54 liter/detik, sehingga masih terdapat sisa kapasitas yang belum dimanfaatkan sebesar 266,46 liter/detik. Sisa kapasitas yang cukup besar tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk menambah pelanggan baru sebanyak 21.316 sambungan langganan. Sehingga dalam beberapa tahun kedepan UPTD Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu tidak perlu membangun system yang baru, sampai sisa kapasitas tersebut habis dimanfaatkan.

Tabel 3.3 Kapasitas Air Terpasang, Dimanfaatkan dan Sisa Kapasitas

NO.	IKK	KAPASITASWTP (Lpd)			
		Terpasang	Dioperasikan	Diproduksi	Sisa Kap.
1	Rambah Hilir	30	20	12,50	17,50
2	Rambah samo	20	20	3,33	16,67

3	Bangun Purba	20	20	5,00	15,00
4	Kunto Darussalam	10	10	2,50	7,50
5	Pendalian 4 Koto	10	10	1,25	8,75
6	Rokan 4 Koto	20	20	2,50	17,50
7	Tambusai Utara	20	20	3,33	16,67
8	Kepenuhan	20	20	1,67	18,33
9	Pasir Pengaraian	70	60	30,00	40,00
10	UjungBatu	40	25	9,38	30,63
11	Tandun	10	10	3,33	6,67
12	Kabun	10	10	1,25	8,75
13	Dalu Dalu	20	20	7,50	12,50
14	Kepenuhan Hulu	20	0	0,00	20,00
15	Pagaran Tapah	10	0	0,00	10,00
16	Bonai Darussalam	20	0	0,00	20,00
	JUMLAH	350	265	83,54	266,46

3.8 Produksi, Distribusi dan Kehilangan Air

Volume air yang diproduksi oleh UPTD Pengelola Air Bersih pada tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 2.547.954 m3. Angka tersebut diperoleh dari perkalian antara kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) dengan jam operasi produksi dan dikurangi satu hari operasi per bulan. Hal ini dilakukan karena tidak tersedia water meter induk di masing-masing unit produksi.

Kapasitas air yang didistribusikan pada tahun 2023 adalah sebesar Kapasitas produksi dan distribusi air BLUD UPTD PAB pada Tahun 2021 dalam melayani kebutuhan pelanggan menurut perkiraan jumlah penduduk yaitu sebesar 50 l/dt dari total jumlah konsumen 4.200 jiwa. Cakupan pelayanan pada tahun 2021 telah mencapai 3,76%. Tingkat kehilangan air yang terjadi pada BLUD UPTD PAB diperkirakan untuk jaringan distribusi rata- rata sebesar 21%, masih berada diatas ambang batas yang ditetapkan yaitu 20%.

Tabel 3.4 Volume Produksi dan Kehilangan Air

NO.	IKK	VOLUMEAIR(M3)			KEHILANGAN AIR	
		Produksi	Distribusi	Terjual	M3	%
1	Rambah Hilir	381.240	362.178	138.364	223.814	61,80%
2	Rambah samo	101.664	96.581	15.850	80.731	83,59%
3	Bangun Purba	152.496	144.871	1.747	143.124	98,79%
4	Kunto Darussalam	76.248	72.436	8.951	63.485	87,64%
5	Pendalian 4 Koto	38.124	36.218	4.768	31.450	86,84%
6	Rokan 4 Koto	76.248	72.436	13.609	58.827	81,21%
7	Tambusai Utara	101.664	96.581	58.429	38.152	39,50%
8	Kepenuhan	50.832	48.290	4.704	43.586	90,26%
9	Pasir Pengaraian	914.976	869.227	439.774	429.453	49,41%
10	UjungBatu	285.930	271.634	53.892	217.742	80,16%
11	Tandun	101.664	96.581	59.741	36.840	38,14%
12	Kabun	38.124	36.218	-	36.218	100,00%
13	Dalu Dalu	228.744	217.307	113.391	103.916	47,82%
14	Kepenuhan Hulu					
15	Pagaran Tapah					
16	Bonai Darussalam					
	JUMLAH	2.547.954	2.420.556	913.220	1.507.336	62,27%

3.9 Tarif Layanan Air Bersih

Tarif Retribusi pemakaian Air Bersih UPTD Pengelola Air Bersih diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Lampira IX tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:

3.9.1 Tarif Pemakaian Air

Besaran tarif pemakaian air dibedakan ke dalam tiga kelompok pelanggan, dengan tujuan supaya adanya subsidi silang antara pelanggan yang mampu dengan yang kurang mampu. Besaran tarif juga dibedakan kepada empat blok pemakaian air, dengan tujuan supaya ada penghematan pemakaian air. Karena pemakaian pelanggan semakin tinggi, besaran tarif yang dikenakan semakin tinggi pula. Untuk lebih jelasnya besaran tarif pemakaian air, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	Golongan Pelanggan	BLOK KONSUMSI (M3)			
		>10	11 s/d 20	21 s/d 30	30 keatas
	Kelompok I				
1.	Rumah Tangga I	Rp.2.500,-	Rp.3.000,-	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-
2.	Sosial Umum	Rp. 1.800,-	Rp.2.300,-	Rp.2.800,-	Rp.3.300,-
3.	Hidran Umum	Rp. 1.500,-	Rp.2.000,-	Rp.2.500,-	Rp.3.000,-
	Kelompok II				
4.	Rumah Tangga 2	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
5.	Sosial Khusus	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
6.	Instansi Pemerintah	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.6.000,-
7.	Instansi Swasta	Rp.4.700	Rp.5.200,-	Rp.5.700,-	Rp.6.200,-
8.	TNI/POLRI	Rp.3.500,-	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-
9.	Niaga Kecil	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Rp.6.000,-
10.	Industri Kecil	Rp.4.700,-	Rp.5.200,-	Rp.5.700,-	Rp.6.200,-
	Kelompok III				
11.	Rumah Tangga 3	Rp.4.000,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-
12.	Niaga Besar	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Rp.6.000,-	Rp.6.500,-
13.	Industri Besar	Rp.6.000,-	Rp.6.500,-	Rp.7.000,-	Rp.7.500,-

Tabel 3.5 Tarif Pemakaian Air Bersih

3.9.2 Biaya Tetap dan Pembayaran Lainnya

Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan biaya tetap dan pembayaran lainnya yang disatukan dalam rekening tagihan Air Bersih setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya Administrasi: Rp2.500,-/bulan/rekening
- 2) Meteran Air Ukuran 1/2”: Rp5.000,-/bulan/rekening
- 3) Meteran Air Ukuran 3/4”: Rp10.000,-/bulan/rekening
- 4) Meteran Air Ukuran 1”: Rp20.000,-/bulan/rekening
- 5) Meteran Air Ukuran 2”: Rp50.000,-/bulan/rekening
- 6) Meteran Air Ukuran 3”: Rp65.000,-/bulan/rekening
- 7) Meteran Air Ukuran 4”: Rp105.000,-/bulan/rekening
- 8) Meteran Air Ukuran 6”: Rp125.000,-/bulan/rekening

3.9.3 Rekening Air Bersih Jasa Mobil Tangki

Rekening Air Bersih Jasa Mobil Tangki ditetapkan dan disesuaikan dengan harga Rp15.000,- per M3 dan penjualan air di luar kota setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM sebesar Rp1.500,- Km/Mobil. Khusus untuk terminal air ditetapkan dengan harga Rp10.000,-/M3 .

3.9.4 Biaya Pemasangan Sambungan

NO	OBJEK	URAIAN PEKERJAAN							KET
		UANG PENDAF-TARAN	BIAYA PEREN-CANAAN	BIAYA GAMBAR	BIAYA PENYA-DAPAN	BIAYA LANG-GANAN	BIAYA PEMA-SANGAN	JUMLAH	
	Kelompok I								
1	Rumah Tangga I	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
2	Sosial Umum	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
3	Hidran Umum	Rp.10,000	Rp.25,000	Rp.15,000	Rp.400,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.600,000	Meteran ½',3/4'
	Kelompok II								
4	Rumah Tangga 2	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
5	Sosial Khusus	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
6	Instansi Pemerintah	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
7	Instansi Swasta	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
8	TNI/POLRI	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
9	Niaga Kecil	Rp.10,000	Rp.30,000	Rp.15,000	Rp.500,000	Rp.50,000	Rp.100,000	Rp.705,000	Meteran ½',3/4'
	Kelompok III								
10	Rumah Tangga 3	Rp.20,000	Rp.30,000	Rp.25,000	Rp.525,000	Rp.100,000	Rp.150,000	Rp.850,000	Meteran ½',3/4'
11	Niaga Besar	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.4,500,000	Rp.300,000	Rp.750,000	Rp.6,000,000	Meteran Air 1"
12	Industri Besar	Rp.250,000	Rp.300,000	Rp.250,000	Rp.15,000,000	Rp.500,000	Rp.2,500,000	Rp.18,800,000	Meteran Air 2"

Tabel 3.6 Biaya Pemasangan Sambungan Langganan Baru

Kelompok I terdiri dari:

- a. Rumah Tangga I yaitu rumah tangga yang rumahnya semi permanen dengan lantai dari semen dan hanya satu lantai;
- b. Sosial Umum yaitu mesjid, musholla dan posyandu; dan
- c. Hidran Umum yaitu kran umum yang terletak di tempat umum dan berfungsi sebagai sumber air penanganan pembakaran.

Kelompok II terdiri dari:

- a. Rumah Tangga II yaitu rumah tangga yang rumahnya permanen satu sampai dua lantai;
- b. Sosial Khusus yaitu Rumah Sekolah dan Kampus, sesuai dengan jumlah orang yang berada di Rumah Sekolah dan Kampus, maka untuk pemasangan Water Meter 1' dan 2' dikenakan biaya pemasangan sesuai dengan Niaga Besar dan Industri Besar;
- c. Instansi Pemerintah yaitu perkantoran pemerintah atau fasilitas pemerintah lainnya seperti sekolah, madrasah, kantor BUMN dan BUMD;

- d. Instansi Swasta adalah kantor swasta bank dan kantor perusahaan;
- e. TNI/POLRI yaitu kompleks atau perumahan yang dikhususkan bagi TNI dan POLRI; dan
- f. Industri Kecil yaitu bangunan yang digunakan untuk usaha industri kecil.

Kelompok III terdiri dari:

- a. Rumah Tangga III yaitu rumah permanen dua lantai dan/ atau rumah mewah;
- b. Niaga Besar yaitu bangunan yang dipergunakan untuk usaha besar seperti rumah sakit atau pergudangan; dan
- c. Industri Besar yaitu pabrik dan kawasan industri.
- d. Sanksi dan Denda:
 - 1) Pembayaran yang dilaksanakan setelah batas akhir bulan tagihan di atas tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.500,-.
 - 2) Pembayaran yang dilaksanakan pada bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp5.000,-.
 - 3) Pembayaran tunggakan rekening air setelah 2 bulan dari rekening dalam tagihan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp5.000,-
 - 4) Tunggakan diatas 3 (tiga) bulan maka saluran pipa akan diputuskan dan akan disambungkan kembali setelah penyelesaian rekening berikut denda dan biaya penyambungan kembali sebesar Rp75.000,-.
 - 5) Water meter yang telah dipasang menjadi tanggungan pelanggan pengambilan air sebelum meteran sebesar 5 (lima) X Rekening.
 - 6) Segel pada meter air putus/rusak sebesar 3 (tiga) X Rekening.
 - 7) Mengadakan perubahan apapun terhadap pipa dinas dan alat-alat dipasang sebesar 3 (tiga) X Rekening.
 - 8) Menjual dan memperdagangkan air tanpa izin sebesar 5 (lima) X Rekening.
 - 9) Penambahan pipa persil tanpa izin dikenakan jasa perubahan dari harga bahan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
 - 10) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, maka pelanggan tidak terdaftar sebagai konsumen dan apabila pelanggan hendak menyambung kembali dikenakan biaya penyambungan baru.

3.10 Kondisi Keuangan

UPTD Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu telah menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PERNYATAAN No. 13 Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Laporan Keuangan BLUD. Berikut ini disajikan laporan keuangan per 31 Desember 2023.

3.11 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan ini menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pendapatan UPTD Pengelola Air Bersih tahun 2023 adalah

sebesar Rp2.726.450.000,- apabila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.821.353.040,- maka realisasi pendapatan hanya tercapai 71,35%. Namu apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.331.645.500,- terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp394.804.500 atau sebesar 16,93%.

Realisasi belanja UPTD Pengelola Air Bersih tahun 2023 adalah sebesar Rp7.498.861.412,- apabila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp8.669.857.403,- maka realisasi belanja hanya tercapai 86,49%. Namun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar Rp9.340.862.159,- terdapat penurunan belanja sebesar Rp1.842.000.747 atau sebesar 19,72%.

Kemampuan pendapatan UPTD PAB untuk menutup kebutuhan belanja pada tahun 2023 adalah sebesar 36,36%, dan pada tahun 2022 sebesar 24,96%. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan yang membaik. Meskipun masih jauh dari sasaran mencapai full cost recovery. Laporan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel .7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR BERSIH LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2023 dan 2022					
URAIAN	Cat	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran
		ANGGARAN	REALISASI	% Tase	2022
					REALISASI
PENDAPATAN - LRA					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
Pendapatan Pajak Daerah			-	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Air Minum		3.821.353.040	2.726.450.000	71,35	2.331.645.500
Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.821.353.040	2.726.450.000	71,35	2.331.645.500
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Bahan-bahan Kimia		698.688.000	678.277.488	-	487.020.990
Belanja Bahan-bahan Baku					80.955.500
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang lainnya		50.000.000	37.544.000		221.674.549
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Alat Listrik		11.500.000	11.500.000		1.369.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.000.000	1.000.000		10.834.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		658.320.000	658.320.000		100.300.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Electric Generating Set		160.000.000	160.000.000		599.528.750
Belanja Pegawai dan Honoror		2.938.582.800	2.938.582.800		2.938.582.800
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.471.331.000	426.465.000		3.380.625.580
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		191.618.400	191.618.400		111.300.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.120.800	5.120.800		30.245.800
Belanja Tagihan Listrik		1.971.196.403	1.878.210.524		1.378.388.990
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Pompa		162.500.000	162.500.000		
Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi		75.000.000	75.000.000		
JUMLAH BELANJA		8.394.857.403	7.224.139.012	86,05	9.340.826.159
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah		-	-		
Belanja Pompa		175.000.000	175.000.000	100,00	-
Belanja Software		100.000.000	99.722.400	99,72	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-		
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-		-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	
Jumlah Belanja Modal		275.000.000	274.722.400	99,90	-
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga		-	-		-
Jumlah Belanja Tak Terduga		-	-		-
JUMLAH BELANJA		8.669.857.403	7.498.861.412	86,49	9.340.826.159
SURPLUS/DEFISIT		(4.848.504.363)	(4.772.411.412)	98,43	(7.009.180.659)

3.12 Laporan Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan asset/kekayaan, kewajiban serta ekuitas entitas pada suatu saat tertentu. Dengan pengertian tersebut maka dari neraca UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu menyajikan nilai perolehan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp169.837.000.230,- dibandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan, karena adanya tambahan investasi sebesar Rp825.000.000,-. Namun nilai asset secara keseluruhan sebesar Rp90.550.177.840,- terdapat penurunan sebesar Rp9.242.620.952 dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp99.792.798.792,-. Penurunan ini disebabkan beban operasional masih lebih besar dari pendapatan operasional. Rincian laporan neraca dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.8 Neraca UPTD Pengelola Air Bersih
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR BERSIH

NERACA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

	Cat	2023	2022
A SET LANCAR			
		-	-
Piutang Pelanggan		6.289.931.287	5.698.325.287
Persediaan		-	-
Sub Total Aset Lancar		6.289.931.287	5.698.325.287
A SET INVESTASI :			
Investasi Dalam Proyek Pembangunan			
Investasi Permanen Lainnya			
Sub Total Aset Investasi		-	-
A SET TETAP :			
Tanah		-	-
Instalasi Pengolahan Air		68.151.358.100	68.151.358.100
Bangunan Sipil		31.025.354.000	30.875.354.000
Jaringan Perpipaan		56.211.108.530	55.711.108.530
Elektrikal & Mekanikal		14.449.179.600	14.274.179.600
Nilai Perolehan Aset		169.837.000.230	169.012.000.230
Penyusutan Aset Tetap		(85.576.753.677)	(74.917.526.725)
Nilai Buku Aset Tetap		84.260.246.553	94.094.473.505
A SET LAIN-LAIN			
Aset Lain-lain			-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			-
Sub Total Aset Lainnya		-	-
TOTAL A SET		90.550.177.840	99.792.798.792

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR BERSIH

NERACA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh)

	Cat	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :			
Utang Pihak Ketiga (PFK)		-	-
Utang Bunga		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Sub Total Kewajiban Jangka Pendek		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :			
Utang Pemerintah Pusat		-	-
Utang Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Sub Total Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Ekuitas			
Penyertaan Modal :			
- Ekuitas Pemda Kab. Rokan Hulu		169.837.000.230	169.012.000.230
- Eks Asset Pengadaan APBD			
- Surplus (Defisit) s/d tahun lalu		(68.627.595.438)	(58.627.474.487)
- Surplus (Defisit) tahun berjalan		(10.659.226.951)	(10.591.726.951)
Sub Total Ekuitas		90.550.177.840	99.792.798.792
TOTAL KEWAJIBAN & EKITAS		90.550.177.840	99.792.798.792

3.13 Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban operasional UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu kurun waktu tahun 2023. Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan operasional tahun tersebut adalah Rp9.950.589.012,-. Sedangkan beban operasional setahun mencapai Rp20.609.815.963,- . Sehingga terjadi deficit yang cukup besar pada tahun tersebut. Rincian laporan operasional dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.9 Laporan Operasional
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TAHUN 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dan rupiah penuh)

URAIAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Jasa Layanan Air Bersih	2.726.450.000	2.331.645.500
Pendapatan Jasa Pasang Baru		
Pendapatan dari APBN/D	7.224.139.012	9.340.826.159
Pendapatan Jasa Giro		
Jumlah Pendapatan	9.950.589.012	11.672.471.659
BEBAN OPERASIONAL		
Penyetoran Kas Daerah	2.726.450.000	2.331.645.500
Belanja Bahan-bahan Kimia	678.277.488	487.020.990
Belanja Bahan-bahan Baku	-	80.955.500
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang lainnya	37.544.000	221.674.549
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan	11.500.000	1.369.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	10.834.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim P	658.320.000	100.300.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Electric Gener	160.000.000	599.528.750
Belanja Pegawai dan Honorer	2.938.582.800	2.938.582.800
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	426.465.000	3.380.625.580
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	191.618.400	111.300.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kanto	5.120.800	30.245.800
Belanja Tagihan Listrik	1.878.210.524	1.378.388.990
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Pompa	162.500.000	-
Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Gas- Jaringan Pipa	75.000.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap	10.659.226.951	10.591.726.951
Jumlah Beban Operasional	20.609.815.963	22.264.198.610
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus (defisit) Penjualan Aset	-	-
Penurunan nilai Aset		-
Surplus (defisit) Non Operasional Lainnya		-
Jumlah Kegiatan Non Operasional	-	-
SURLUS (DEFISIT)	(10.659.226.951)	(10.591.726.951)

3.14 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan jumlah arus kas yang masuk dan yang keluar pada UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu kurun waktu tahun 2023. Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan operasional tahun tersebut adalah Rp9.950.589.012,-, yang terdiri dari penerimaan hasil operasional jasa layanan Air Bersih sebesar Rp2.726.450.000,- dan penerimaan dari APBD sebesar Rp7.224.139.012,-.

Dari angka tersebut terlihat bahwa kemampuan dari penerimaan operasional untuk menanggung kebutuhan beban operasional baru mencapai 37,74%. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2022, kemampuan menanggung beban operasional hanya mencapai 24,96%, terjadi perbaikan kemampuan keuangan sebesar 12,78%. Rincian laporan arus kas dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.10 Laporan Arus Kas
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Jasa Layanan Air Bersih	2.726.450.000	2.331.645.500
Penerimaan Subsidi APBN/D	7.224.139.012	9.340.826.159
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	9.950.589.012	11.672.471.659
Arus Kas Keluar		
Penyetoran Kas Daerah	2.726.450.000	2.331.645.500
Belanja Bahan-bahan Kimia	678.277.488	487.020.990
Belanja Bahan-bahan Baku	-	80.955.500
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang lainnya	37.544.000	221.674.549
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.500.000	1.369.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	10.834.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	658.320.000	100.300.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Electric Ger	160.000.000	599.528.750
Belanja Pegawai dan Honorer	2.938.582.800	2.938.582.800
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	426.465.000	3.380.625.580
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	191.618.400	111.300.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kar	5.120.800	30.245.800
Belanja Tagihan Listrik	1.878.210.524	1.378.388.990
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu Pompa	162.500.000	-
Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Gas- Jaringan P	75.000.000	-
Jumlah Arus Kas Keluar	9.950.589.012	11.672.471.659
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	-	-
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan dari Investasi APBD	274.722.400	-
Jumlah Arus Kas Masuk	274.722.400	-
Arus Kas Keluar		
Tanah	-	-
Instalasi Pengolahan Air	-	-
Bangunan Sipil	-	-
Jaringan Perpipaan	-	-
Pengadaan Software	99.722.400	-
Elektrikal & Mekanikal	175.000.000	-
Jumlah Arus Kas Keluar	274.722.400	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-	-
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas Masuk	-	-
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD AB	-	-
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD AB	-	-

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan dari suatu organisasi atau entitas, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki Visi yang terkait dengan pelayanan Air Bersih. Visi ini didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional SPAM, yang secara umum menyebutkan kriteria bagi daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh Air Bersih yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan Air Bersih yang aman, baik dilingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
2. Masyarakat dapat mengolah Air Bersih secara langsung dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
3. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan Air Bersih yang efisien, profesional dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
5. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
6. Pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih.

Visi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu yang dikelola oleh UPTD Pengelola Air ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih yang Berkualitas & Berkelanjutan”

Berkualitas : Air Bersih yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan (memenuhi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologis) **Berkelanjutan**: Air Bersih yang dapat dinikmati saat ini maupun di masa datang dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya air dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya serta memenuhi 2 aspek keberlanjutan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan Air Bersih untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis yang berkelanjutan dan kearifan lokal.
Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Air Bersih memenuhi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dan keterjangkauan:
 - Air Bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang

- terjangkau.
- Pelayanan Air Bersih dilakukan secara adil dan merata.
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus.
- Peningkatan jam operasional UPTD PAB Kab. Rokan Hulu dari 4 jam menjadi 24 jam.
- b. Pelayanan Air Bersih memenuhi aspek kualitas.
 - Penyediaan Air Bersih memenuhi standar kualitas Air Minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi Air Bersih secara langsung baik dari jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
- 2. Memenuhi kebutuhan air baku:

Misi ini memiliki pemahaman untuk menjaga ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:

 - a. Perlindungan air baku oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih:
 - a. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - b. Peningkatan kelembagaan UPTD PAB Kab. Rokan Hulu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) agar dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya;
 - c. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih.
- 4. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat. Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:
 - a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan kewirausahaan dalam pengembangan Air Bersih.
 - b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Adanya sistem informasi Sistem Penyediaan Air Bersih yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih, usaha dan masyarakat.

4.2 MISI

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan Air Bersih untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis yang berkelanjutan dan kearifan lokal. Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut
 - a. Pelayanan Air Bersih memenuhi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dan keterjangkauan:

- Air Bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau.
 - Pelayanan Air Bersih dilakukan secara adil dan merata.
 - Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus.
 - Peningkatan jam operasional UPTD PAB Kab. Rokan Hulu dari 4 jam menjadi 24 jam.
- b. Pelayanan Air Bersih memenuhi aspek kualitas.
- Penyediaan Air Bersih memenuhi standar kualitas Air Minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi Air Bersih secara langsung baik dari jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
2. Memenuhi kebutuhan air baku:
- Misi ini memiliki pemahaman untuk menjaga ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:
- a. Perlindungan air baku oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih
- a. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - b. Peningkatan kelembagaan UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) agar dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya;
 - c. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih.
4. Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat. Misi ini memiliki pemahaman sebagai berikut:
- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan kewirausahaan dalam pengembangan Air Bersih.
 - b. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih.
 - Adanya sistem informasi Sistem Penyediaan Air Bersih yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih, usaha dan masyarakat dalam.

BAB V

ANALISA SWOT

Analisis SWOT faktor internal dan eksternal merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi di dalam unit organisasi (internal) dan kondisi di luar (eksternal) yang memberikan pengaruh secara signifikan pada perkembangan UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu di masa mendatang.

Indikator kondisi internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi bersangkutan. Dengan memahami kondisi internal pihak pengambil keputusan akan mudah untuk menetapkan langkah - langkah atau kebijakan yang akan diambil apakah lebih berorientasi pada memperkecil kelemahan yang dimiliki atau mengembangkan organisasi sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Indikator kondisi eksternal meliputi peluang dan ancaman, diperlukan pengetahuan yang mendalam dari organisasi terhadap peluang dan ancaman dengan selalu berkomunikasi dengan semua stakeholder untuk menetapkan langkah yang akan diambil.

Dengan mengacu kepada analisis internal dan eksternal yang dilakukan dalam organisasi Sistem Penyediaan Air Minum pada umumnya, maka dalam analisis ini UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu juga akan menggunakan metode yang sama dengan organisasi SPAM pada umumnya.

5.1 Analisis Faktor Internal

Sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi SPAM pada umumnya, untuk mengetahui faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dapat ditinjau dari 4 (empat) indikator yaitu:

- a. Aspek teknik
- b. Aspek keuangan
- c. Aspek organisasi dan sumber daya manusia
- d. Aspek pelayanan pelanggan dan masyarakat.

Namun demikian, karena kondisi UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk pada awal tahun 2018, maka analisis faktor internal dilakukan sebagaimana umumnya yang dilakukan untuk organisasi yang sudah berjalan dan berpengalaman, untuk itu analisis faktor internal akan disesuaikan dengan kondisi UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dengan tetap memperhatikan ke empat faktor internal yang akan dianalisis.

Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal

FAKTOR INTERNAL	KONDISI SAAT INI	NILAI
Aspek Teknik	▪ Kapasitas terpasang 350 lt/dt baru dapat dimanfaatkan 84 lt/dt atau baru 24%. ▪ Kondisi IPA perlu banyak perbaikan untuk menghasilkan kualitas air yang sesuai standar Permenkes. ▪ Jaringan pipa distribusi untuk pengembangan layanan masih terbatas untuk memenuhi minat masyarakat. ▪ Tingkat kehilangan air di jaringan distribusi cukup tinggi yaitu 62%.	Negatif Negatif
Aspek Keuangan	▪ Adanya dukungan pendanaan dari Pemda untuk kebutuhan biaya operasional dan pengembangan pelayanan ▪ Penerimaan dari hasil retribusi air baru bisa menutupi kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 36,36%, sebagian besar masih disubsidi.	Positif Negatif
Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	▪ Terlalu banyak SDM dalam mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Bersih sebanyak 135 orang untuk jumlah pelanggan sebanyak 5.611 SL. Sehingga rasio pengawai per 1.000 SL adalah 24.	Negatif

	Adanya keinginan dari seluruh jajaran di Pemda Kab. Rokan Hulu untuk merubah bentuk kelembagaan menjadi BLUD, sehingga pengelolaan diharapkan akan lebih professional dan lebih berkembang lagi.	Positif
Aspek Pelayanan Pelanggan	Pelayanan Air Bersih kepada pelanggan yang meliputi : Kualitas air hasil olahan belum pernah diperiksa di Laboratorium yang Terakreditasi Kuantitas distribusi dan kontinuitasnya belum mencapai 24 jam	Negatif

5.2 Analisis Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang digunakan dalam analisis SWOT UPTD Pengelola Air Bersih meliputi:

- a. Aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. Aspek dukungan pemerintah daerah dan DPRD; dan
- c. Aspek hukum.

Analisis faktor eksternal akan disesuaikan dengan kondisi UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 5.2 Analisis Faktor Eksternal

FAKTOR EKSTERNAL	KONDISI SAAT INI	NILAI
Aspek Geographi Wilayah	Pada umumnya masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki sumber air yang memadai, sehingga masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap UPTD PAB.	Positif

	▪ Luasan wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang sangat besar dengan kepadatan penduduk yang rendah, untuk melakukan pengembangan pelayanan memerlukan investasi yang tinggi.	Negatif
Aspek Sosial, Ekonomi masyarakat	▪ Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten pada umumnya sudah cukup baik, sebagian besar sebagai pekerja yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya	Positif
Aspek dukungan pemerintah daerah	▪ Pemda Kabupaten Rokan Hulu sangat mendukung program pelayanan Air Bersih, baik dari segi organisasi maupun ketersediaan anggaran bahkan telah mencanangkan pembentukan BLUD UPTD PAB	Positif
Aspek hukum	▪ Regulasi yang cukup tersedia yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung berkembangnya BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu.	Positif

Analisis Faktor Internal menunjukkan 2 bobot positif dan 5 negatif, dengan demikian UPTD Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan beberapa tahun ke depan memerlukan pembenahan secara internal, baik dalam aspek teknik, aspek pelayanan, dan aspek sumber daya manusia. Pembenahan yang perlu dilakukan pada bidang teknik meliputi memperbaiki dan melengkapi system dalam instalasi pengolahan air, memperbaiki system pembubuhan bahan kimia, dan melengkapi alat

pendukung pengukuran kehilangan air. Pembenahan dalam aspek pelayanan meliputi perbaikan kualitas air dan menambah jam operasi distribusi. Untuk aspek sumber daya manusia yang sudah terlalu banyak, perlu ada kebijakan untuk menarik sebagian PNS ke lingkungan Pemda dan beberapa tahun ke depan jangan ada penambahan pegawai baru.

Analisis Faktor Eksternal menunjukkan 4 bobot positif dan 1 bobot negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor peluang di lingkungan eksternal lebih besar daripada faktor ancaman. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan cakupan masyarakat yang terlayani Air Bersih, mengingat sisa kapasitas yang belum dimanfaatkan juga masih sangat besar dan kebutuhan Masyarakat akan pelayanan Air Bersih juga cukup tinggi.

5.3 Matrix Strategi dan Program

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal dimana strategi umum yang akan dilakukan adalah melakukan upaya pembenahan kondisi internal serta penetrasi pasar untuk meningkatkan volume penjualan, maka beberapa strategi bidang telah ditentukan. Matriks strategi sebagai analisis strategi bidang dibangun dari analisis SWOT diatas, yaitu memadukan antara masing-masing elemen SWOT.

- a. Kekuatan dukungan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu cukup kuat dan telah diatur dalam perda, akan memungkinkan pelayanan Air Bersih di wilayah Kabupaten Rokan Hulu akan dapat dilakukan secara penuh, optimalisasi kapasitas produksi juga masih terus dilakukan dengan dukungan dari Balai Pengembangan Prasarana wilayah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Kondisi instalasi pengolahan air yang kurang baik, hendaknya dijadikan prioritas dalam program optimalisasi sistem.
- c. Selanjutnya, kelemahan masih terbatasnya jaringan distribusi juga supaya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. Sumber daya manusia yang ada perlu lebih ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya, dan untuk PNS sebaiknya sebagian ditarik ke lingkungan pemerintah daerah. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sehingga peluang untuk melakukan peningkatan penjualan dapat diperoleh dengan makin tingginya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
- e. Melakukan penyesuaian tarif Air Bersih secara teratur dan regular untuk mengantisipasi adanya kenaikan biaya operasional seiring adanya inflasi atas biaya pada tahun-tahun di depan termasuk adanya kenaikan biaya energi dan bahan bakar. Program ini juga dalam jangka panjang ditujukan agar UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu dapat beroperasi pada kondisi yang full cost recovery.

5.4 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan Sistem Penyediaan Air Bersih. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2021–2026 dan sasaran RPJMN 2020–2024, serta sasaran Jakstranas. Adapun arahan kebijakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. Peningkatan penyediaan air baku untuk air bersih berkelanjutan;
2. Peningkatan akses aman Air Bersih bagi seluruh masyarakat perkotaan dan pedesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih;
4. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
5. Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
7. Pemanfaatan dan inovasi teknologi Sistem Penyediaan Air Bersih.

Kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih Kab. Rokan Hulu dijabarkan ke dalam beberapa strategi yang nantinya strategi – strategi ini akan dijabarkan ke dalam beberapa rencana tindak. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih Kab. Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Bersih berkelanjutan	1.1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku 1.2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk Air Bersih 1.3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai 1.4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui system Regional
2	Peningkatan akses aman Air Bersih bagi seluruh masyarakat perkotaan dan pedesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	2.1. Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui Sistem Penyediaan Air Bersih bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan 2.2. Menurunkan tingkat kehilangan air 2.3. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan Air Bersih terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah di setiap daerah di Kabupaten Rokan Hulu 2.4. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Bersih 2.5. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 2.6. Meningkatkan kualitas Air Bersih yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku

3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih	3.1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih
		3.2. Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih
		3.3. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD pada UPTD PAB Kab. Rokan Hulu
		3.4. Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk Penyelenggara/operator Sistem Penyediaan Air Bersih
		3.5. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
4	Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	3.6. Mengembangkan manajemen asset Sistem Penyediaan Air Bersih dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
		4.1. Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara Sistem Penyediaan Air Bersih
		4.2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih
		4.3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR)
		4.4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

5	Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah	5.1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih
		5.2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia
		5.3. Menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Bersih sesuai dengan kaidah teknis
6	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan Masyarakat	6.1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih
7	Pemanfaatan dan inovasi teknologi Sistem Penyediaan Air Bersih	7.1. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang Air Bersih
		7.2. Memasarkan hasil inovasi teknologi
		7.3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku
		7.4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih

Tabel 5.3 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih Kab. Rokan Hulu

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

6.1 Strategi dan Pengembangan

Program pengembangan BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu untuk masa 5 tahun di depan disusun berdasarkan kajian analisis SWOT dan kondisi terkini dilapangan. Untuk merealisasikan program yang ditetapkan dalam upayanya mencapai sasaran pengembangan jangka pendek, maka program aspek teknik dan non-teknik dibutuhkan.

Program yang akan dilakukan pada 5 tahun ke depan oleh BLUD UPTD PAB, Pembenahan system teknik dan non teknik serta mengembangkan cakupan pelayanan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu dimana sampai dengan akhir tahun 2023, BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu baru melayani 5.611 pelanggan.

6.2 Proyeksi Penduduk dan Target Cakupan Pelayanan

Penentuan jumlah penduduk pada masa yang akan datang (proyeksi jumlah penduduk) selanjutnya dihitung menggunakan metode geometrik. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan data Kabupaten Dalam Angka pada tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar 0,97 % per tahun. Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk adalah 573.510 jiwa. Rincian Jumlah penduduk per kecamatan disajikan pada table berikut ini.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Pendalian IV koto	12.480
2	Rokan IV Koto	24.090
3	Tandun	32.370
4	Kabun	27.550
5	Ujung Batu	50.240
6	Rambah Samo	33.970
7	Rambah	52.750
8	Rambah Hilir	41.020
9	Bangun Purba	19.640
10	Tambusai	60.880
11	Tambusai Utara	86.780
12	Kepenuhan	27.760
13	Kepenuhan Hulu	18.480
14	Kunto Darussalam	45.490
15	Pagaran Tapah Darussalam	12.260
16	Bonai Darussalam	27.750
Jumlah Total		573.510

Proyeksi kebutuhan Air Bersih dalam penyusunan perencanaan teknis merupakan salah satu variable yang turut menentukan kapasitas Sistem Penyediaan Air Bersih yang dibutuhkan, tanpa mengabaikan factor kelayakan teknis dan kelayakan finansial/ keuangan.

Perhitungan kapasitas Sistem Penyediaan Air Bersih disesuaikan dengan kebutuhan Air Bersih menurut tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah yang menjadi target pengembangan pelayanan Air Bersih. Perhitungan kebutuhan Air Bersih mempertimbangkan beberapa hal antara lain tingkat cakupan pelayanan Air Bersih saat ini, komposisi antara pelanggan domestic dan non domestic, tingkat kehilangan air (NRW), tingkat konsumsi, kemampuan membayar tarif air dan minat keinginan menjadi pelanggan BLUD UPTD PAB serta rencana pengembangan wilayah berdasarkan RTRW dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih daerah yang bersangkutan.

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih disusun secara bertahap berdasarkan perencanaan lima tahunan yaitu Program Jangka Menengah (5 tahun), jangka pendek (2 tahun), program jangka menengah (10 tahun) dan program jangka panjang (15-20 tahun). Proyeksi pertumbuhan penduduk dan target cakupan pelayanan di wilayah pengembangan disajikan pada table berikut:

Tabel 6.2 Proyeksi Penduduk Dan Target Cakupan Pelayanan

NO ·	URAIAN	SATUA N	RELIS ASI	PROYEKSI TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	573.510	579.073	584.690	590.362	596.088	601.870	607.708
2.	Laju Pertumbuhan	%	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
3.	Jumlah Sambungan	SR	5.611	5.731	7.231	8.731	10.231	11.731	13.231
4.	Rencana Penambahan SR	SR		120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Rata-rata Jiwa per SR	Jiwa	5	5	5	5	5	5	5
6.	Penduduk terlayani	Jiwa	28.055	28.655	36.155	43.655	51.155	58.655	66.155
7.	Cakupan Pelayanan	%	4,89%	4,95%	6,18%	7,39%	8,58%	9,75%	10,89%

6.3 Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Program peningkatan pelayanan Air Bersih bertujuan untuk meningkatkan akses Air Bersih melalui sosialisasi program, pembangunan sarana Air Bersih, pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan kesinambungan program. Untuk Sistem Penyediaan Air Bersih yang dikelola oleh BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki sisa kapasitas yang cukup besar, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan belum diperlukan menambah Instalasi Pengolahan Air yang baru, tetapi cukup dengan pengembangan jaringan pelayanan. Berikut program pengembangan pelayanan Air Bersih di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 6.3 Program Pengembangan Pelayanan

No.	Unit SPAM	Kapasitas (lpd)	SL Eksisting	Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Rambah Hilir	30	867		100	100	100	100	100
2	Rambah samo	20	105		100		100	100	
3	Bangun Purba	20	200		100		100	100	100
4	Kunto Darussalam	10	112						
5	Pendalian 4 Koto	10	58						
6	Rokan 4 Koto	20	90		100	100		100	
7	Tambusai Utara	20	266		100	100		100	100
8	Kepenuhan	20	34		100	100	100	100	100
9	Pasir Pengaraian	70	1.862		300	500	500	500	500
10	Ujung Batu	40	464		200	200	200	200	200
11	Tandun	10	763						
12	Kabun	10	5						
13	Dalu Dalu	20	785		100	100	100		100
14	Kepenuhan Hulu	20			150	150	150	150	150
15	Pagaran Tapah	10			50	50	50	50	50
16	Bonai Darussalam	20			100	100	100		100
Jumlah		350	5.611	389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

6.4 Program Pendanaan Investasi

Sumber pembiayaan investasi sesuai rencana pengembangan (Rencana Strategis) jangka pendek, akan diperoleh dari pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah melalui (APBD).

Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menyebutkan bahwa sumber pendapatan BLUD dapat diperoleh dari APBD berupa pendapatan dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. Sementara itu, sumber pendapatan dari APBN merupakan pendapatan yang berasal dari APBN berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

Untuk memproyeksikan seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih termasuk didalamnya pendapatan dan biaya operasional untuk masa 5 tahun didepan akan disajikan dalam table berikut.

Tabel 6.4 Sumber Pendanaan Investasi

dalam Rp.000

No.	Unit IKK	Kapasitas as Lpd	Target SL	Sumber Dana				Jumlah
				APBN	APBD Prov	APBD ROHUL	Equity BLUD	
1	Rambah Hilir	30	500				2.500.000	2.500.000
2	Rambah samo	20	300					-
3	Bangun Purba	20	300					-
4	Kunto Darussalam	10						-
5	Pendalian 4 Koto	10						-
6	Rokan 4 Koto	20	300					-
7	Tambusai Utara	20	300					-
8	Kepenuhan	20	300					-
9	Pasir Pengaraian	70	2.000	10.000.000				10.000.000
10	UjungBatu	40	1.000					-
11	Tandun	10						-
12	Kabun	10						-

13	Dalu Dalu	20	300					-
14	Kepenuhan Hulu	20	1.000		10.000.000			10.000.000
15	Pagaran Tapah	10	200					-
16	Bonai Darussalam	20	1.000			15.000.000		15.000.000
	JUMLAH	350	7.500	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2.500.000	37.500.000

Tabel 6.5 Rekapitulasi Pendanaan Per Tahun

(Dalam Rp.000)								
No	SUMBER DANA	Satuan	TAHUN					JUMLAH
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	APBN	Rp.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
2	APBD PROVINSI	Rp.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
3	APBD KABUPATEN ROKAN HULU/DAK	Rp.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
4	EQUITY PERUMDAM	Rp.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
	JUMLAH	Rp.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	37.500.000

6.5 Rencana Program Bidang

1. Bidang Teknik Operasional

Secara umum, pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih oleh BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu akan dilakukan di seluruh sektor. Program guna pengembangan di bidang teknis dan operasional dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan atas sumber daya yang telah dibantu oleh Pemerintah Pusat di Tahun sebelumnya.
- Pengembangan lanjut di unit produksi, transmisi, distribusi dan wilayah pelayanan.

Sasaran

- Meningkatkan kualitas pelayanan;
- Peningkatan jangkauan pelayanan;
- Peningkatan kapasitas produksi; dan
- Meminimalisasi tingkat kehilangan air.

Kegiatan

- Pemasangan jaringan distribusi dan sambungan langganan baru sebanyak 350 SL untuk Sistem Penyediaan Air Bersih;
- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih bekerjasama dengan Badan Usaha untuk pelayanan ke wilayah;
- Percepatan penanganan kerusakan jaringan serta kebocoran langsung dan pengecekan jalur pipa secara berkala; dan
- Pemeriksaan akurasi meter pelanggan dan mengganti meter air yang rusak.

Indikator Kinerja

- a) Bertambahnya cakupan wilayah pelayanan; dan
- b) Penurunan tingkat kebocoran air.

2. Bidang Keuangan

Untuk peningkatan kinerja di bidang keuangan, diperlukan rencana bisnis dan anggaran yang memadai sehingga BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan mereka menjadi lebih baik kedepannya yakni:

Sasaran

- a. Meningkatkan pendapatan BLUD UPTD PAB;
- b. Meningkatnya efisiensi biaya operasional;
- c. Meningkatnya pemberdayaan modal sendiri;
- d. Tersedianya laporan keuangan secara wajar dan regular;
- e. Meningkatnya disiplin penggunaan anggaran; dan
- f. Meningkatnya efektifitas penagihan tunggakan rekening.

Kegiatan

- a. Menyesuaikan tarif untuk mencapai *Full Cost Recovery* secara bertahap;
- b. Pengawasan pembiayaan yang lebih ketat;
- c. Peningkatkan kegiatan penagihan;
- d. Pembuatan laporan secara rutin dan tepat waktu;
- e. Peningkatan pemahaman staf keuangan mengenai pedoman akuntansi berlaku;
- f. Pembentukan tim penagihan tunggakan; dan
- g. Pembuatan system penagihan online.

Indikator Kinerja

- a. Meningkatnya rasio keuntungan;
- b. Membaiknya rasio biaya operasional; dan
- c. Meningkatnya efektivitas penagihan.

3. Bidang Pelayanan Pelanggan

Bidang pelayanan pelanggan cukup penting bagi BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu, untuk dikembangkan lebih jauh. Adapun rencana program yang dinilai efektif untuk memperkuat hubungan serta meningkatkan kepuasan para pelanggannya.

Sasaran

- a. Meningkatnya jumlah sambungan rumah baru;
- b. Meningkatnya kualitas air hasil pengolahan;
- c. Meningkatnya jam operasi pendistribusian air;
- d. Membaiknya Tingkat kepuasan pelanggan.; dan
- e. Tersedianya system pembayaran online.

Kegiatan

- a. Penambahan jumlah sambungan langganan baru;
- b. Memperbaiki dan melengkapi system pengolahan air;
- c. Menambah jam operasi produksi dan distribusi;
- d. Melaksanakan program penurunan kehilangan air;
- e. Percepatan penanganan pengaduan pelanggan;
- f. Penyempurnaan prosedur pemasangan sambungan baru;
- g. Pembuatan system pembayaran online;
- h. Melakukan survey kepuasan pelanggan; dan
- i. Melakukan kegiatan tatap muka secara berkala dengan pelanggan.

Indikator Kinerja

- a. Peningkatan kepuasan pelanggan; dan
- b. Peningkatan jumlah pelanggan.

4. Bidang Sumber Daya Manusia

BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan agar bisa semakin berkembang. Adapun rencana program di bidang SDM adalah sebagai berikut:

Sasaran

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas SDM;
- b. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM;
- c. Meningkatnya efisiensi SDM yang dimiliki; dan
- d. Membaiknya rasio SDM terhadap pelanggan.

Kegiatan

- a. Pengorganisasian dan penempatan pegawai sesuai struktur organisasi dan beban kerja BLUD;
- b. Peningkatan pengiriman pegawai dalam diklat/ seminar;

- c. Pengurangan jumlah pegawai PNS sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. Melakukan pelatihan, *in house training* dan pendidikan ke pegawai.

Indikator Kinerja

- a. Meningkatnya kinerja pegawai;
- b. Meningkatnya rasio jumlah pelanggan per 1.000 pelanggan; dan
- c. Meningkatnya kepuasan pelanggan.

5. Bidang Umum

Program Bidang Umum, BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu memiliki rencana yang dapat membangun efektifitas dan efisiensi perusahaannya yang dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

Sasaran

- a. Menyempurnakan Prosedur Kerja atau *Standard Operation Procedure (SOP)*; dan
- b. Melengkapi *Management Information System (MIS)*.

Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman pegawai akan SOP masing-masing bagian dengan diadakan sosialisasi dan pengawasan secara berkala;
- b. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen di segala aspek kinerja; dan
- c. Mengubah iklim kerja yang nyaman dan kondusif agar sesuai dengan keadaan karyawan.

Indikator Kinerja

- a. Peningkatan pemahaman kepatuhan pegawai terhadap SOP;
- b. Peningkatan pemahaman dan pengertian pegawai terhadap informasi dapat diterima dan dimengerti oleh seluruh pegawai; dan
- c. Peningkatan iklim kerja yang kondusif.

BAB VII
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

7.1 Asumsi Dasar Perhitungan Proyeksi Keuangan

Analisa dan perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk adalah dasar penyusunan perencanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk jangka menengah yang disusun dengan pendekatan dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Jangka waktu perencanaan adalah 5 tahun;
2. Tingkat inflasi diproyeksikan sebesar 4% per tahun;
3. Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk dihitung berdasarkan data empiris tahun 2022 ke tahun 2023 adalah 0,97% per tahun;
4. Jumlah jiwa per SL (Sambungan Langganan) yang diperghitungkan adalah 5 (lima) jiwa;
5. Penambahan jumlah sambungan langganan sebanyak 1.500 per tahun dan dimulai tahun 2025;
6. Biaya Investasi untuk optimalisasi sebesar Rp5.000.000,- per sambungan langganan, selanjutnya diproyeksikan naik sebesar Tingkat inflasi;
7. Asumsi pelayanan air bersih eksisting melalui Kran Umum/Hidran Umum (KU-HU) tidak ada penambahan selama tahun perencanaan;
8. Tingkat konsumsi air rata-rata yang proyeksikan sesuai dengan realisasi tahun 2023;
9. Tingkat kehilangan air diproyeksikan menurun sebesar 5% per tahun;
10. Kenaikan tarif penjualan air direncanakan tahun 2027 sebesar 25%; dan
11. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan tidak ada penambahan jumlah pegawai.

Tabel 7.1 Asumsi Dasar Perhitungan Proyeksi Tahun 2024 – 2029

NO.	URAIAN	SATUAN	Eksisting 2023	TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Inflasi	%		4%	4%	4%	4%	4%	4%
2	Volume Air Diproduksi	m3/thn	2.547.954	2.723.841	3.233.404	3.446.362	3.616.498	3.755.546	3.871.316
3	Volume Air Terjual	m3/thn	913.220	976.320	1.220.400	1.464.480	1.708.560	1.952.640	2.196.720
4	Konsumsi air rata-rata	m3/SL/bln	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56
5	Tingkat Kehilangan air distribusi	%	62,27	62,27	60,27%	55,27%	50,27%	45,27%	40,27%
6	Rasio karyawan per 1.000 SL	orang	24	23	18	15	13	11	10
7	Biaya investasi per SL	Rp.		5.000.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320	5.849.293	6.083.265
8	Tarif Rata-rata	Rp./m3	3.633	3.633	3.633	3.633	4.541	4.541	4.541
9	Jumlah Pegawai	orang	135	135	135	135	135	135	135
9	Jumlah Pelanggan	SL	5.611	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500
Asumsi Biaya Operasional									
8	Biaya Air Baku	Rp/m3		-	-	-	-	-	-
9	Personil / Karyawan	Jumlah bln	12	12	12	12	12	12	12
10	Personil / Karyawan	Rp./org/bln	1.813.940	1.813.940	1.904.637	1.999.869	2.099.862	2.204.855	2.315.098
11	Power/ Energi	Rp/m3	737	767	797	829	862	897	933
12	Bahan Kimia dan Pembantu	Rp/m3	266	277	288	299	311	324	337
13	Pemeliharaan	%	171	178	185	192	200	208	216
14	Bahan Bakar	Rp/m3	167	174	181	188	196	204	212
15	Pengolahan Lumpur	Rp/m3							
16	Biaya Administrasi & Umum	Rp/m3	340	354	368	383	398	414	431
17	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	% Nilai aset	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
18	Efektivitas Penagihan	%	82,17%	82,17%	84,17%	86,17%	88,17%	90,17%	92,17%

7.2 Asumsi-asumsi yang digunakan

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam memproyeksikan laporan keuangan BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan hulu kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun sejalan dengan perhitungan teknis dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap (Investasi) dan Sumber Pembiayaan

Aset tetap disajikan sebesar nilai perolehannya, sedangkan pengakuan aset berdasarkan prinsip manfaat ekonomi dalam arti hanya aset yang masih memberikan manfaat ekonomi kepada BLUD UPTD PAB yang dicatat dalam proyeksi keuangan, sementara aset yg tidak lagi memberikan manfaat ekonomi dikeluarkan dari proyeksi keuangan ini.

Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan kisaran prosentase berkisar antara 5% s/d 50 % per tahun sesuai dengan jenis asetnya.

Adapun aset tetap yang dikelola BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berasal dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.2 Daftar Aset Tetap Tahun 2023

NO.	JENIS ASET TETAP	NILAI Rp.
1	Tanah	-
2	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	68.151.358.100
3	Bangunan Sipil	31.025.354.000
4	Jaringan Perpipaan	56.211.108.530
5	Elektrikal dan Mekanikal	14.449.179.600
	Nilai Perolehan Aset Tetap	169.837.000.230
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisas	- 85.576.753.677
	Nilai Buku Aset Tetap	84.260.246.553
	TOTAL ASET	84.191.618.958

b. Pendapatan

Pendapatan BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berasal dari 3 sumber yaitu :

a) **Pendapatan Penjualan Air**

Asumsi yang digunakan dalam menghitung besaran pendapatan penjualan air digunakan berdasarkan tarif rata-rat per M3 sebesar Rp. 3.633,- dan pada tahun 2027 direncanakan naik sebesar 25%.

Tabel 7.3 Rencana Peningkatan Pendapatan Proyeksi Tahun 2024 - 2029

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tarif rata-rata	Rp/m3	3.633	3.633	3.633	4.541	4.541	4.541
2.	Rencana kenaikan tarif	%				25%		
3.	Jumlah SL akhir tahun	unit	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500
	Jumlah SL Aktif		5.611	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000
4.	Rata-rata konsumsi SL	m3/bln	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56
5.	Volume air terjual	m3/thn	913.220	976.532	1.220.665	1.464.798	1.708.931	1.953.064
6.	Pendapatan :							
	- Penjualan Air	Rp.000	3.317.728	3.547.740	4.434.675	6.652.013	7.760.681	8.869.350
	- Biaya penyambungan	Rp.000	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	- Denda dan lain lain	Rp.000	-	42.573	53.216	79.824	93.128	106.432
	Jumlah Pendapatan	Rp.000	3.317.728	4.490.313	5.387.891	7.631.837	8.753.810	9.875.782
7.	Efektivitas Penagihan	%	82%	84%	86%	88%	90%	92%
8.	Jumlah Penerimaan	Rp.000	2.726.181	3.928.709	4.774.580	6.844.910	7.990.943	9.181.321

Dalam pengelolaan pelayanan air Bersih sangatlah wajar bilamana seluruh hasil penjualan air bulanan ada sebagian pelanggan yang menunggak pembayarannya, oleh karena itu dalam proyeksi keuangan ini diasumsikan bahwa penerimaan uang dari hasil penjualan air pada tahun 2023 adalah sebesar 82% dan selanjutnya diproyeksikan naik sebesar 2% per tahun, sampai pada tahun 2029 menjadi 92%.

b) Pendapatan Non Air

Ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari beban administrasi (beban tetap), denda atas keterlambatan pembayaran rekening dan pembukaan kembali pelanggan non aktif.

c) Pendapatan Pemasangan Sambungan Baru

Jasa atas pemasangan sambungan pelanggan baru dengan tarif per sambungan sebesar Rp6.00.000,00 per sambungan dan kedepannya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan material dan upah pemasangan. Jumlah penambahan pelanggan dihitung berdasarkan kemampuan BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu. Pendapatan non air yang berasal dari pemasangan baru diterima pada bulan yang sama pada saat pemasangan, sedangkan pendapatan non air yang berasal dari beban tetap, penerimaan uangnya diproyeksikan sama dengan penerimaan uang hasil penjualan air.

c. **Beban Operasional**

Proyeksi beban operasional sepenuhnya mengacu pada perhitungan teknis serta pengalaman dalam pengelolaan operasional pelayanan Air Bersih yang selama ini dilakukan khususnya pada waktu 1 tahun terakhir oleh BLUD UPTD PAB Kabupaten Rokan Hulu. BLUD UPTD PAB mempunyai kewenangan dalam memproduksi, mengolah, menyediakan serta menyalurkan Air Bersih diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Air Bersih yang meningkat setiap tahunnya. Jika produksi dan distribusi Air Bersih tidak ditangani secara tepat akan menimbulkan masalah bagi pelanggan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah besarnya biaya operasional dan pemeliharaan. Berikut disajikan proyeksi kebututuhan biaya operasinal yaitu:

Tabel 7.4 Kebutuhan Biaya Operasional Proyeksi Tahun 2024 – 2029

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN	TAHUN PROYEKSI					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Biaya Air Baku	Rp.000	0	0	-	-	-	-	
2	Personil / Karyawan	Rp.000	2.938.583	2.938.583	3.085.512	3.239.788	3.401.777	3.571.866	3.750.459
3	Power/ Energi	Rp.000	1.878.211	2.088.179	2.577.979	2.857.680	3.118.704	3.368.158	3.610.865
4	Bahan Kimia dan Pembantu	Rp.000	678.277	754.103	930.985	1.031.993	1.126.257	1.216.342	1.303.991
5	Pemeliharaan	Rp.000	435.044	483.678	597.129	661.916	722.376	780.156	836.373
6	Bahan Bakar	Rp.000	426.465	474.140	585.354	648.863	708.131	764.771	819.880
7	Pengolahan Lumpur	Rp.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Biaya Administrasi & Umum	Rp.000	867.559	964.545	1.190.787	1.319.983	1.440.552	1.555.777	1.667.885
9	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	Rp.000	10.659.227	10.659.227	11.129.938	11.600.650	12.071.361	12.542.072	13.012.784
	Jumlah Biaya O & P	Rp.000	17.883.366	18.362.457	20.097.685	21.360.872	22.589.158	23.799.143	25.002.238

• **Produksi, Distribusi, Air Terjual Dan Kebocoran**

Perhitungan volume produksi air sampai terjual Tahun 2013, karena belum dilengkapi dengan water meter induk di unit produksi dan distribusi, maka perhitungan volume air yang diproduksi didasarkan pada kapasitas instalasi pengolahan air dikalikan dengan jam operasi produksi. Demikian pula untuk penetapan volume air yang didistribusikan didasarkan pada volume air yang diproduksi dikurangi tingkat kehilangan air pada unit produksi yang biasanya sekitar 5% yang digunakan untuk aktivitas pemeliharaan dan untuk pemakaian kantor.

Volume produksi air pada tahun 2023 adalah 2.547.954 m3, sedangkan volume air yang diditribusikan kepada pelanggan sebesar 2.420.556 m3. Volume air yang terbaca di konsumen adalah 913.220 m3, tingkat kehilangan air pada system distribusi yaitu sebesar 62,27%, masih jauh dari standar nasional NRW yaitu maksimal 25%. Proyeksi laporan produksi, distribusi, air terjual, dan tingkat kehilangan air tahun 2024 – 2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5 Produksi dan Penjualan Air Proyeksi Tahun 2024 – 2029

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kapasitas Produksi terpasang	lpd	350	350	350	350	350	350
2	Kapasitas Air Dimanfaatkan	lpd	86	103	109	115	119	123
3	Jumlah SL Aktif	SL	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500
4	Rata-rata Konsumsi	m3/SL/bln	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56
5	Volume air diproduksi	m3/thn	2.723.841	3.233.404	3.446.362	3.616.498	3.755.546	3.871.316
6	Volume air Distribusi	m3/thn	2.587.649	3.071.734	3.274.044	3.435.673	3.567.769	3.677.750
7	Kehilangan Air pada Unit Produksi	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
8	Kehilangan Air pada Unit Produksi	m3/thn	136.192	161.670	172.318	180.825	187.777	193.566
9	Volume Air Terjual	m3/thn	976.320	1.220.400	1.464.480	1.708.560	1.952.640	2.196.720
10	Kehilangan Air pada Unit Distribusi	%	62,27%	60,27%	55,27%	50,27%	45,27%	40,27%
11	Kehilangan Air pada Unit Distribusi	m3/thn	1.611.329	1.851.334	1.809.564	1.727.113	1.615.129	1.481.030

7.3 Proyeksi Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, terdiri dari 6 jenis yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir periode;
- c. Laporan operasional (Laba – Rugi) yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
- d. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan atas equity (modal) entitas; dan
- f. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Dalam Renstra proyeksi laporan keuangan hanya menyajikan 3 laporan keuangan pokok Neraca, Laporan Operasional yang disajikan secara accrual basis dan Laporan Arus Kas yang disajikan secara kas basis.

Sejalan dengan asumsi-asumsi investasi, asset tidak lancar dan beban operasional BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, maka proyeksi keuangan kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2029, secara rinci disajikan dibawah ini:

a) **Proyeksi Neraca**

- Neraca adalah suatu daftar yang menyajikan aset (kekayaan), kewajiban dan modal BLUD UPTD PAB pada suatu saat tertentu.
- Kekayaan yang tercantum dalam proyeksi neraca adalah aset lancar dan aset tidak lancar yang berasal dari Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, asset - aset tersebut dalam neraca dinyatakan sebagai Penyertaan modal Pemerintah Daerah (ekuitas), sementara itu untuk saldo kas dan kewajiban tidak dapat dihitung, karena dalam Rencana Strategis ini, karena keseluruhan biaya operasional diasumsikan dibayar tunai dengan dana dari hasil penerimaan penjualan air dan dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Piutang usaha terjadi karena pelanggan memakai air yang didistribusikan oleh BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu terlebih dahulu dan pembayaran oleh pelanggan dilakukan setelah dibaca meter pelanggan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan Proyeksi Neraca BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu untuk kurun waktu tahun 2024 s/d 2029, sebagai berikut:

Tabel 7.6 Relisasi dan Proyeksi Neraca Tahun 2023 – 2029

(Dalam Rp.000)							
URAIAN	Realisasi 2023	Proyeksi Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
ASET LANCAR							
Kas/Setara Kas	0	-	-				
Piutang Pelanggan	6.289.931	6.881.479	7.443.082	8.056.394	8.843.320	9.606.187	10.300.648
Persediaan	0	-	-				
Sub Total Aset Lancar	6.289.931	6.881.479	7.443.082	8.056.394	8.843.320	9.606.187	10.300.648
ASET INVESTASI :							
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total Aset Investasi	-	-	-	-	-	-	-
ASET TETAP :							
Tanah	-	-	-				
Instalasi Pengolahan Air (IPA)	68.151.358	68.151.358	68.151.358	68.151.358	68.151.358	68.151.358	68.151.358
Bangunan Sipil	31.025.354	31.025.354	31.025.354	31.025.354	31.025.354	31.025.354	31.025.354
Jaringan Perpipaan	56.211.109	56.211.109	63.711.109	71.211.109	78.711.109	86.211.109	93.711.109
Elektrikal dan Mekanikal	14.449.180	14.449.180	14.449.180	14.449.180	14.449.180	14.449.180	14.449.180
Nilai Perolehan Aset Tetap	169.837.000	169.837.000	177.337.000	184.837.000	192.337.000	199.837.000	207.337.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	85.576.754	96.235.981	107.365.919	118.966.569	131.037.930	143.580.002	156.592.786

<i>Nilai Buku Aset Tetap</i>	84.260.247	73.601.020	69.971.081	65.870.432	61.299.071	56.256.998	50.744.215
TOTAL ASET	90.550.178	80.482.498	77.414.164	73.926.825	70.142.391	65.863.185	61.044.863
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :							
Utang Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0	0	0	0
Utang Bunga	0	0	0	0	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :							
Utang Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0
Utang Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0	0
Ekuitas							
Penyertaan Modal :							
- Ekuitas Pemda Kab. Rokan Hulu	169.837.000	169.837.000	177.337.000	184.837.000	192.337.000	199.837.000	207.337.000
- Eks Asset Pengadaan APBD	0	0	0	0	0	0	0
- Surplus (Defisit) s/d tahun lalu	- 68.627.595	- 79.286.822	- 89.354.502	- 99.922.836	- 110.910.175	- 122.194.610	- 133.973.815
- Surplus (Defisit) tahun berjalan	10.659.227	- 10.067.679	- 10.568.335	- 10.987.339	- 11.284.435	- 11.779.205	- 12.318.323
Sub Total Ekuitas	90.550.178	80.482.498	77.414.164	73.926.825	70.142.391	65.863.185	61.044.863
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	90.550.178	80.482.498	77.414.164	73.926.825	70.142.391	65.863.185	61.044.863

b) **Proyeksi Operasional**

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan pendapatan dan beban operasional kurun waktu tertentu umumnya selama 1 tahun.

Pendapatan yang tercantum didalam laporan operasional adalah pendapatan yang berasal dari pelanggan dan pendapatan yang berasal dari subsidi APBD Kabupaten Rokan Hulu yang tidak dalam bentuk asset tetap.

Beban operasional yang tercantum dalam laporan operasional adalah seluruh beban operasional sesuai dengan ketentuan yang tercantum Standar Pelaporan Badan Layanan Umum/ Daerah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan Proyeksi Laporan Operasional BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu periode 2024 s/d 2029.

Tabel 7.7 Realisasi dan Proyeksi Kegiatan Operasional Tahun 2023 – 2029

(DalamRp.000)

NO.	URAIAN	REALISASI	PROYEKSI TAHUN					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KEGIATAN OPERASIONAL								
1 PENDAPATAN								
PENDAPATAN PENJUALAN AIR								
	Pendapatan Penjualan Air	2.726.450	3.317.728	3.547.740	4.434.675	6.652.013	7.760.681	8.869.350
	Pendapatan Penjualan melalui Mobil Tangki	0	8	0	5	3	1	0
	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	-	-	-	-	-	-	-
		2.726.450	3.317.728	3.547.740	4.434.675	6.652.013	7.760.681	8.869.350
PENDAPATAN NON AIR								
	Pendapatan Penyambungan Baru	-	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Pendapatan Non Air Lainnya	-	-	42.573	53.216	79.824	93.128	106.432
	Jumlah Pendapatan Non Air	-	-	942.573	953.216	979.824	993.128	1.006.432
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN								
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya (APBD)	7.224.139	7.703.230	5.039.037	4.985.642	3.672.886	3.266.128	2.808.133
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	7.224.139	7.703.230	5.039.037	4.985.642	3.672.886	3.266.128	2.808.133
	JUMLAH PENDAPATAN	9.950.589	11.020.958	9.529.350	10.373.534	11.304.723	12.019.937	12.683.915
2 BEBAN								
	Setoran ke Kas Daerah	2.726.450	3.317.728	-	-	-	-	-
	Personil / Karyawan	2.938.583	2.938.583	3.085.512	3.239.788	3.401.777	3.571.866	3.750.459
	Power / Energi	1.878.211	2.088.179	2.577.979	2.857.680	3.118.704	3.368.158	3.610.865
	Bahan Kimia dan Pembantu Pemeliharaan	678.277	754.103	930.985	1.031.993	1.126.257	1.216.342	1.303.991
	Bahan Bakar Pengolahan Lumpur	435.044	483.678	597.129	661.916	722.376	780.156	836.373
		426.465	474.140	585.354	648.863	708.131	764.771	819.880
	Biaya Administrasi & Umum	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Penyusutan dan Amortisasi	867.559	964.545	1.190.787	1.319.983	1.440.552	1.555.777	1.667.885
	Biaya Penyisihan piutang	10.659.227	10.659.227	11.129.938	11.600.650	12.071.361	12.542.072	13.012.784
	Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Beban	-	-	-	-	-	-	-
		20.609.816	21.680.185					
				20.097.685	21.360.872	22.589.158	23.799.143	25.002.238
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-10.659.227	-10.659.227	-10.568.335	-10.987.339	-11.284.435	-11.779.205	-12.318.323
3 SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL								
	Surplus Penjualan Aset	-	-	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI SURPLUS/DEFISIT BELUM POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-
				-10.659.227	-10.659.227	-10.568.335	-10.987.339	-11.284.435
						-11.779.205	-12.318.323	
4 POS LUAR BIASA								
	Pendapatan Luar Biasa							
	Beban Luar Biasa							
	POS LUAR BIASA							
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-	-	-	-	-	-	-
				-10.659.227	-10.659.227	-10.568.335	-10.987.339	-11.284.435
						-11.779.205	-12.318.323	

c) **Proyeksi Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran uang kurun waktu tertentu umumnya setahun. Penerimaan yang tercantum didalam laporan arus kas adalah penerimaan yang berasal dari pelanggan BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.

Pengeluaran operasional yang tercantum dalam laporan arus kas adalah seluruh pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum Standar Pelaporan Badan Layanan Umum/ Daerah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan Proyeksi Laporan Arus Kas BLUD UPTD PAB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu periode 2024 s/d 2029.

Tabel 7.8 Realisasi dan Proyeksi Arus Kas Tahun 2023 – 2029

(Dalam Rp.000)								
No	Uraian	Realisasi	Proyeksi Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi							
	Arus Masuk Kas:							
	Penerimaan Penjualan Air	2.726.450	2.726.181	2.986.136	3.821.364	5.865.086	6.997.814	8.174.889
	Penerimaan Penyambungan baru			900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Penerimaan Denda dan lain-lain			42.573	53.216	79.824	93.128	106.432
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.726.450	2.726.181	3.928.709	4.774.580	6.844.910	7.990.943	9.181.321
	Arus Kas Keluar:							
	Personil / Karyawan	2.938.583	2.938.583	3.085.512	3.239.788	3.401.777	3.571.866	3.750.459
	Power/ Energi Listrik	1.878.211	2.088.179	2.577.979	2.857.680	3.118.704	3.368.158	3.610.865
	Bahan Kimia dan Pembantu	678.277	754.103	930.985	1.031.993	1.126.257	1.216.342	1.303.991
	Pemeliharaan	435.044	483.678	597.129	661.916	722.376	780.156	836.373
	Bahan Bakar	426.465	474.140	585.354	648.863	708.131	764.771	819.880
	Pengolahan Lumpur							
	Biaya Administrasi & Umum	867.559	964.545	1.190.787	1.319.983	1.440.552	1.555.777	1.667.885
	Jumlah Arus Keluar Kas	7.224.139	7.703.230	8.967.746	9.760.223	10.517.797	11.257.070	11.989.454
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(4.497.689)	(4.977.049)	(5.039.037)	(4.985.642)	(3.672.886)	(3.266.128)	(2.808.133)
II	Arus Kas dari Aktivitas Investasi							
	Arus Masuk Kas:							
	Hasil Penjualan Aset	-	-					
	Hasil Investasi	-	-					
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas:							
	Perolehan Tanah	-	-					
	Perolehan Gedung dan Bangunan	-	-					
	Perolehan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
	Perolehan Jaringan Perpipaan	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	-	-					
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	-	(7.500.000)	(7.500.000)	(7.500.000)	(7.500.000)	(7.500.000)
III	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan							
	Arus Masuk Kas:							
	Penerimaan Pinjaman	-	-					
	Subsidi APBD KAB./PROV./APBN	7.224.139	7.703.230	12.539.037	12.485.642	11.172.886	10.766.128	10.308.133
	Jumlah Arus Masuk Kas	7.224.139	7.703.230	12.539.037	12.485.642	11.172.886	10.766.128	10.308.133
	Arus Keluar Kas:							
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-					
	Penyetoran ke Kas Daerah	2.726.450	2.726.181	-	-	0	0	0

Jumlah Arus Keluar Kas	2.726.450	2.726.181	-	-	-	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.497.689	4.977.049	12.539.037	12.485.642	11.172.886	10.766.128	10.308.133
Kenaikan/ Penurunan Kas BLUD	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	-	-	-	-	-	-	-

7.4 Analisa Atas Proyeksi Laporan Keuangan

a. Tujuan analisa keuangan

Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan analisis laporan keuangan, antara lain:

- Melalui perhitungan rasio keuangan diharapkan agar informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan lebih mudah dibaca dan ditafsirkan
- Memudahkan untuk mengetahui posisi pengelola Sistem Penyediaan Air Bersih di tengah industri SPAM lain
- Sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan model prediksi.
- Memudah membandingkan perusahaan dengan Perusahaan lain, atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik.
- Lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan prediksi di masa yang akan datang.

b. Jenis-Jenis Analisa Keuangan

- Rasio-Rasio Neraca

Adalah rasio-rasio yg disusun dari data yg berasal dari neraca misalnya; current ratio, Acid test-ratio, current assets to total assets ratio, current lialibilities to total assets ratio dan lain sebagainya.
- Rasio Laporan Operasional

Rasio-rasio yang disusun berdasarkan income statements, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain sebagainya.
- Rasio-Rasio Antar Laporan Keuangan

Adalah rasio keuangan yang disusun berdasarkan Neraca dan data lainnya yg berasal dari Laporan Operasional, misalnya assets turnover, inventory turnover, receivables turnover dan sebagainya.

Dalam Rencana Strategis ini akan disajikan beberapa rasio yang bermanfaat bagi manajemen dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi kinerja dan sebagai dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 7.9 Proyeksi Rasio Kenerja Tahun 2024 - 2029

JENIS RASIO KINERJA	RUMUS	TAHUN					2029
		2024	2025	2026	2027	2028	
A. Rasio Keuangan							
- Efektifitas Penagihan	Penerimaan Penjualan Air	2.726.181	2.986.136	3.821.364	5.865.086	6.997.814	8.174.889
	Pendapatan Penjualan Air	3.317.728	3.547.740	4.434.675	6.652.013	7.760.681	8.869.350
	Hasil Perhitungan : (%)	82,17	84,17	86,17	88,17	90,17	92,17

- Pendapatan Operasi Terhadap	Pendapatan Operasi	2.726.181	3.928.709	4.774.580	6.844.910	7.990.943	9.181.321
Biaya Operasi	Biaya Operasi	7.703.230	8.967.746	9.760.223	10.517.797	11.257.070	11.989.454
	Hasil Perhitungan : (%)	35,39	43,81	48,92	65,08	70,99	76,58
- Profit Margin	Surplus (Defisit)	(10.659.227)	(10.568.335)	(10.987.339)	(11.284.435)	(11.779.205)	(12.318.323)
	Pendapatan Keseluruhan	3.317.728	4.490.313	5.387.891	7.631.837	8.753.810	9.875.782
	Hasil Perhitungan : (%)	(321,28)	(235,36)	(203,93)	(147,86)	(134,56)	(124,73)
B. Rasio Teknis Operasi							
- Pemanfaatan Kapasitas	Volume Produksi Air (l/dt)	86	103	109	115	119	123
	Kapasitas Terpasng (l/dt)	350	350	350	350	350	350
	Hasil Perhitungan : (%)	24,68	29,29	31,22	32,77	34,03	35,07
- Non Revenue Water	Vol. Distribusi - Vol. Terjual	1.611.329	1.851.334	1.809.564	1.727.113	1.615.129	1.481.030
	Volume Distribusi Air	2.587.649	3.071.734	3.274.044	3.435.673	3.567.769	3.677.750
	Hasil Perhitungan : (%)	62,27	60,27	55,27	50,27	45,27	
- Rasio pegawai per 1000 SL	Jumlah Pegawai x 1000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Jumlah Pelanggan	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500
	Hasil Perhitungan :	22,50	18,00	15,00	12,86	11,25	10,00
- Cakupan Pelayanan	Jumlah Penduduk Terlayani	28.655	36.155	43.655	51.155	58.655	66.155
	Jumlah Penduduk Kabupaten	579.073	584.690	590.362	596.088	601.870	607.708
	Hasil Perhitungan : (%)	4,95	6,18	7,39	8,58	9,75	10,89

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP.19840916 201001 1 008